

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL (DBH), DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL

(Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana S-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

AGUNG DWianto

B200120056

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL (DBH), DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL

(Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

AGUNG DWIANTO

B 200 120 056

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



(Eny Kusumawati, SE, Ak, MM., CA)

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL (DBH), DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL

(Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2013)

OLEH

AGUNG DWIANTO

B200120056

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 31 Oktober 2016
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan penguji:

1. Eny Kusumawati, SE,Ak, MM., CA.
Ketua Dewan Penguji
2. Dra. Mujiyati, MSi.
Anggota I Dewan Penguji
3. Dra. Rina Trisnawati,MSi,Ph.D,Ak, CA.
Anggota II Dewan Penguji

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, SE, M.Si)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 Oktober 2016

Yang Menyatakan



AGUNG DWIANTO

B 200 120 056

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL (DBH), DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL

(Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014)

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris dengan menggunakan data sekunder, mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian belanja modal. Sampel yang digunakan adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah periode 2012-2013 yaitu sebanyak 35. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan sampel jenuh (sensus). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis mencakup regresi linier berganda, uji F, uji R^2 dan uji t. Semua data yang diperoleh, diolah dengan menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Dalam asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, tidak terjadi autokorelasi dan terbebas dari multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Sehingga data tidak bias. Berdasarkan hasil pengujian statistik t_{hitung} probabilitas PAD sebesar 0,000 ($p < 0,05$), t_{hitung} probabilitas DBH sebesar 0,804 ($p > 0,05$), t_{hitung} probabilitas DAU sebesar 0,013 ($p < 0,05$), dan t_{hitung} probabilitas DAK sebesar 0,061 ($p > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Sedangkan untuk variabel DBH dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal karena memiliki nilai signifikansi $t > 0,05$.

Kata kunci: Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal.

Abstract

The purpose of this study is to provide empirical evidence by using secondary data, regarding the effect of regional income, revenue-sharing, the general allocation fund and special allocation funds to the allocation of capital expenditures. The method used in this research is descriptive analysis method. Data analysis techniques were used to test the hypothesis includes multiple linear regression, F test, R^2 test and t test. All data collected, processed using the test the classical assumption of normality test, autocorrelation test, multikolinearitas test and heteroskedastisitas test. So that the data did not deviate. Based on the results of statistical test $t_{calculate}$ probability of PAD as big as 0,000 ($p < 0,05$), $t_{calculate}$ probability of DBH as big as 0,804 ($p > 0,05$), $t_{calculate}$ probability of DAU as big as 0,013 ($p < 0,05$), and $t_{calculate}$ probability of DAK as big as 0,061 ($p > 0,05$). This suggests that the PAD and DAU significant effect on the allocation of capital expenditures. Whereas for the variable DBH and DAK no significant effect on the allocation of capital expenditure because it has significant value $t > 0,05$.

Keywords: Regional income, revenue-sharing, the general allocation fund, a special allocation of funds and capital expenditure.

1. PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 tahun 2004, memberikan wewenang seluasnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan dari pemerintah pusat. Otonomi daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif di daerah. Diberlakukannya otonomi daerah diharapkan memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif, dan meningkatkan kinerja keuangan daerah (Yuwanto dkk, 2007: 328).

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 2, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang menambah manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah, sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja. Setiap daerah tidak mempunyai kemampuan keuangan yang sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini, pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan pusat ke daerah yang membutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam

menyelenggarakan tugas dan tanggungjawabnya untuk dapat memberikan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan pula dapat meningkatkan belanja modal daerah tersebut. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi hasil (DBH).

Dana Alokasi Umum adalah komponen terbesar dalam dana perimbangan. Menurut Halim (2002: 160), DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan tersebut, khususnya DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya. Penggunaan DAU diserahkan kepada daerah sesuai prioritas daerah yang idealnya dialokasikan untuk belanja yang berimplikasi meningkatkan efisiensi, efektifitas pelayanan kepada masyarakat serta dapat meningkatkan belanja modal daerah.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No.33 Tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat, dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam belanja modal dan pemerintah daerah. Sehingga semakin besar presentasi dana yang dikeluarkan pemerintah melalui DAK maka akan berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Selanjutnya, berdasarkan PP N0. 55 tahun 2005 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pada dasarnya, selain dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan pendapatan daerah, DBH juga bertujuan untuk memberikan keadilan bagi daerah atas potensi yang dimiliki. Oleh sebab itu, bila angka persentase anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah tersebut besar, pemerintah daerah dapat lebih banyak mengalokasikan dana yang ada untuk memajukan potensi daerah sehingga akan berpengaruh terhadap belanja modal daerah tersebut.

Dengan diberikannya dana perimbangan oleh pemerintah kepada daerah, maka diharapkan dapat meningkatkan output dari waktu ke waktu sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian. Menurut Sukirno (2008: 445), faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah kekayaan sumber daya alam dan tanahnya, jumlah dan mutu tenaga kerja, barang-barang modal yang tersedia, tingkat teknologi yang digunakan serta sistem sosial dan sikap masyarakat. Sehingga, apabila terjadi peningkatan output dari waktu ke waktu, maka anggaran belanja modal daerah tersebut juga akan meningkat disetiap tahunnya.

2. METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah Tahun 2012-2014. Pemilihan sampel yang akan diajukan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang ditentukan. Adapun kriteria yang ditentukan dalam proses pengambilan sampel, sebagai berikut: (1) Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah yang mengeluarkan laporan realisasi APBD dari tahun 2012-2014. (2) Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah yang menyediakan data terkait dengan variabel penelitian secara lengkap.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Belanja Modal

Pengertian belanja modal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Pengukuran variabel ini didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah, PP Nomor 71 Tahun 2010, yaitu dengan:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset lainnya.

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002: 138). Rumus menghitung pendapatan asli daerah yaitu:

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Halim, 2009).

Dana alokasi umum untuk kabupaten/kota dialokasikan atas dasar rumus alokasi sebagai berikut (Darmadi, 2013):

DAU Kabupaten/Kota = $90\% \times 25\% \times \text{PDN (Pendapatan Dalam Negeri)} \times \text{Bobot DAU}$

Dana Alokasi Khusus

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, DAK untuk masing-masing pemerintah provinsi dapat dilihat dari dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD (Wandira, 2013).

Dana Bagi Hasil

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Indikator DBH adalah sebagai berikut: DBH pajak dan DBH bukan pajak (sumber daya alam). Variabel DBH diukur dengan menggunakan skala rasio. DBH dapat diukur dengan perhitungan:

DBH = Bagi Hasil Pajak + Bukan Pajak

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan presentasi kenaikan pendapatan nasional secara riil pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan pendapatan nasional riil tahun

sebelumnya (Sukirno, 2008: 29). Pertumbuhan ekonomi digambarkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi} = (\text{PDRBt} - (\text{PDRBt-1})) / (\text{PDRBt-1}) \times 100\%$$

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu alokasi belanja modal dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{BM} = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DAU} + \beta_3 \text{DAK} + \beta_4 \text{DBH} + \beta_5 \text{PT} + e$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

PAD =Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

DBH = Dana Bagi Hasil

PT = Pertumbuhan Ekonomi

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

e = Koefisien *error*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas dilakukan dengan *Kolmogorov Smirnov-Test*. Berikut hasil pengujian dengan *Kolmogorov Smirnov-Test*. Hasil pengujian *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,942 dan nilai *Asymptotic Significance* sebesar 0,338 artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Berdasarkan kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan nilai residual berdistribusi normal atau memenuhi syarat uji normalitas.

Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini menggunakan uji autokorelasi dilakukan dengan *Durbin-Watson*, berikut hasil dari pengujian autokorelasi menggunakan pendekatan *Durbin-Watson*. dapat diketahui bahwa hasil perhitungan uji autokorelasai memperoleh nilai DW sebesar 1,749, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai batas bawah -2 dan batas atas +2, jika nilai DW

terletak di antara -2 dan +2 ($-2 < DW < +2$) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak ada masalah autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Dari hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa tidak ada satupun dari variabel bebas yang mempunyai nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,1. Begitu juga nilai VIF masing-masing variabel tidak ada yang lebih besar dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang sempurna antara PAD, DAU, DAK, DBH, dan PE, sehingga model regresi tersebut tidak ada masalah multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas adalah menggunakan uji *Park Glejser*. Berikut hasil pengujian heterokedastisitas dengan menggunakan uji *Park Glejser*. Dari hasil perhitungan yang disajikan pada tabel 4.6 menunjukkan tidak ada heteroskedastisitas yang terjadi dalam proses estimasi parameter model regresi, dimana variabel independen tidak ada yang signifikan, hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan di atas 5% ($\alpha = 0,05$). Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Hasil uji t untuk variabel pendapatan asli daerah diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,580 dengan signifikansi sebesar 0,564, karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} (-0,580 lebih kecil dari -2,003) atau nilai signifikansi di diatas 0,05 (0,564 lebih besar dari 0,05), maka H_1 ditolak, artinya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

Hasil uji t untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 9,044 dengan signifikansi sebesar 0,000, karena t_{hitung} lebih besar dari t-tabel (9,044 lebih besar dari 2,003) atau nilai signifikansi dibawah 0,05 (0,000 lebih kecil dari 0,05), maka H_2 diterima, artinya variabel DAU berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

Hasil uji t untuk variabel dana alokasi khusus diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -2,488 dengan signifikansi sebesar 0,016, karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (-2,488 lebih besar dari -2,003) atau nilai signifikansi di bawah 0,05 (0,016 lebih kecil dari 0,05), maka H_3 diterima, artinya variabel DAK berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Hasil uji t untuk variabel dana bagi hasil diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -2,349 dengan signifikansi sebesar 0,022, karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (-2,349 lebih besar dari -2,003) atau nilai signifikansi di bawah 0,05 (0,022 lebih kecil dari 0,05), maka H_4 diterima, artinya variabel DBH berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PE) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Hasil uji t untuk variabel dana bagi hasil diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -3,592 dengan signifikansi sebesar 0,001, karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (-3,592 lebih besar dari -2,003) atau nilai signifikansi di bawah 0,05 (0,001 lebih kecil dari 0,05), maka H_5 diterima, artinya variabel PE berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasanyang dilakukan, maka kesimpulan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Sedangkan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Sampel pada penelitian ini terbatas pada Provinsi Jawa Tengah. Hasil yang berbeda mungkin akan diperoleh apabila menambah sampel yang lain. (2) Variabel yang digunakan mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pertumbuhan Ekonomi. Hasil yang berbeda mungkin akan diperoleh apabila menambah variabel-variabel yang lain. (3) Peneliti hanya menggunakan data tiga tahun, sehingga tidak dapat diketahui kecenderungan antar waktu untuk periode yang lebih lama.

Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka dapat dijadikan sebagai acuan untuk memberikan saran guna meningkatkan kualitas penelitian berikut.

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut: (1) Bagi peneliti selanjutnya, agar mengambil sampel seluruh provinsi di Indonesia. (2) Menambah variabel-variabel penelitian lain, seperti jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, dan variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan menunjukkan apakah penelitian menggunakan sampel yang banyak dan variabel yang lebih bervariasi dapat memberikan hasil yang berbeda atau sama. (3) Untuk peneliti selanjutnya agar menggunakan data dengan waktu lebih dari tiga tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H., & Muhammad, S. K. (2012). *Teori, Konsep dan Aplikasi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Edisi Revisi.
- Halim, A. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN: Edisi Pertama
- Nuarsia, S. A. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAN DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal* , 90.
- Permana, D. Y. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi* , 12.
- Putu, L. R., Kadek, N. S., & Adi, Y. G. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha* , 7.
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Kuncoro, M. (2012). *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan?*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. ANDI Yogyakarta.

Erlina, Sakti, O. R., & Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

_____. 2000 *Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000. Jakarta: Sekretariat Negara.

_____. 2003. *Undang-Undang tentang Keuangan Negara*. UU No. 17 Tahun 2003. Jakarta: Sekretariat Negara.

_____. 2005. *Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. PP No. 58 Tahun 2005.

_____. 2005. *Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. PP No. 24 Tahun 2005.

_____. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011.

_____. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*. PMK No. 219/PMK05/2013.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Diperbanyak oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Diperbanyak oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.

Ghozali, I. (2011). *Ekonometrika*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Gujarati, Damodar (2010). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat

Suara Merdeka. 2016, 25 April. *Merespons Isu Strategis Kemiskinan dan Pengangguran*, halaman 7.

Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Undip.

<http://www.jateng.bps.go.id>. Diakses pada 14 Juni 2016. Pukul 10.

Wisnu, Asrul Setiawan. (2015). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Yogyakarta Periode 2007-2013*, Skripsi, 64.